

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan 29 kabupaten dan 9 kota dan memiliki luas sebesar 47.803,49 km². Secara geografis, karakteristik wilayah Provinsi Jawa Timur memiliki potensi untuk dikembangkan karena letaknya yang strategis dan terdapat berbagai objek wisata yang ditawarkan mulai dari gunung, pantai, gua hingga air terjun yang 1tatis terdapat pada setiap Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Jawa Timur sendiri memiliki 508 pulau dan menempati peringkat ke-9 dari daftar 10 provinsi dengan jumlah pulau terbanyak tahun 2022.² Dengan berbagai potensi dan sumber daya alam yang dimiliki dapat membantu dalam percepatan pembangunan ekonomi daerah.

Potensi Provinsi Jawa Timur tidak hanya dari sumber daya alam/objek wisata yang ada, melainkan juga berasal dari segi pertumbuhan penduduk dan keuangan daerahnya. Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 dari hasil proyeksi BPS Jawa Timur adalah sebanyak 41.149.974 jiwa.³ Jawa Timur menempati peringkat ke-2 provinsi dengan jumlah penduduk paling banyak di Indonesia setelah provinsi Jawa Barat. Keuangan daerah

²Badan Pusat Statistik, "Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi," 2022, <https://jatim.bps.go.id/statictable/2022/05/31/2300/>.

³ Badan Pusat Statistik, "Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2021-2023" (Jawa Timur, 2023), <https://jatim.bps.go.id/indicator/12/375/1/jumlah-penduduk-provinsi-jawa-timur.html>.

Jawa Timur memiliki APBD yang cukup besar dibandingkan provinsi lainnya, oleh karena itu penting dalam penyusunan dan realisasi anggaran daerah agar berdampak pada masyarakat.

Pembangunan dalam aspek ekonomi dan sosial yang dijalankan oleh pemerintah memerlukan sebuah perencanaan anggaran. Pemerintah pusat memiliki kemampuan untuk memobilisasi dana pembangunan melalui sumber fiskal nasional atau penerimaan negara, sedangkan pemerintah daerah masih memiliki banyak keterbatasan sumber penerimaan fiskal.⁴ Penerimaan pemerintah pusat tidak semuanya dapat diberikan kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah perlu untuk menggali potensi daerahnya sendiri. Potensi suatu daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan daerah menjadikan pemerintah daerah mandiri dan tidak tergantung pada pemerintah pusat sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.⁵ Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertuang dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang terdiri dari pajak daerah, retribusi atau pungutan langsung, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain daerah yang dianggap sah.⁶ Salah satu penerimaan dalam pendapatan asli

⁴ Roseida Cantika and Wahyu Hidayat Riyanto, "Efektivitas dan Kontribusi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah di Satuan Wilayah Pengembangan Malang Raya," *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)* 7, no. 02 (2023): 211–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jie.v7i02.24634>.

⁵ Rendy Armando Kakasih, George M.V. Kawung, dan Steeva Y.L Tumangkeng, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara Periode 2009-2016," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 18, no. 02 (2018): 124–34, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/20101>.

⁶ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018) hlm 5.

daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah terutang yang dibebankan kepada orang pribadi ataupun badan yang sifatnya memaksa. Selain menjadi sumber penerimaan bagi daerah, pajak juga berfungsi untuk mengawasi dan mengatur kegiatan swasta dalam perekonomian.

Upaya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah diperlukan adanya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan terhadap subjek dan objek daripada pajak daerah.⁷ Peningkatan pendapatan daerah juga dapat didorong melalui potensi daerah yang didukung oleh pemerintah daerah serta pihak – pihak terkait. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan pendapatan lain-lain yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi indikator tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian daerah tersebut dalam hal keuangan, begitupun sebaliknya. Berikut adalah data realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022.

⁷ Diah Ayuk Wulandari and Andi Kartika, “Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran serta Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah,” *Derivatif: Jurnal Manajemen* 15, no. 2 (2021): 164–79, <https://doi.org/https://doi.org/10.24127/jm.v15i2.609>.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur
Tahun 2018-2022 (dalam Milyaran Rupiah)⁸

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
	Anggaran	Realisasi	%
2018	32.815,36	37.086,32	113.02
2019	35.465,94	39.344,67	110.94
2020	39.782,73	37.042,89	93.11
2021	37.044,34	40.942,41	110.52
2022	39.320,25	43.469,95	110.55

Tabel 1.1 merupakan data realisasi pendapatan asli daerah Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020 realisasi pendapatan asli daerah turun 4tatist hanya di angka 93.11% atau sebesar Rp. 37.042,89 milyar dari anggaran yang dipatok sebesar Rp. 39.782,73 milyar. Dikutip dari website Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur penurunan dikarenakan dampak dari adanya pandemi Covid-19 yang juga berpengaruh terhadap kekuatan APBD Jawa Timur tahun anggaran 2020.⁹ Sedangkan di tahun 2022 realisasi pendapatan asli daerah kembali naik dan memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu dengan anggaran sebesar Rp. 39.320,25 milyar dan realisasinya sebesar 110.55% atau sebesar Rp. 43.469,95 milyar.

⁸ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (djk.kemenkeu.go.id), diakses pada 23 Desember 2023

⁹ Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, “Dampak Pandemi, Pendapatan Daerah APBD Jatim Mengalami Penurunan,” 2020, <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/dampak-pandemi-pendapatan-daerah-p-apbd-jatim-tahun-2020-mengalami-penurunan->.

Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) membawa manfaat bagi pemerintah daerah dan juga masyarakat. PAD yang tinggi dapat digunakan untuk mendanai berbagai proyek pembangunan di tingkat daerah seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Terciptanya infrastruktur yang lebih baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan pendapatan daerah yang mampu membiayai kegiatan daerahnya sendiri, akan memberikan fleksibilitas dan otonomi keuangan yang lebih besar sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat.

Pertumbuhan ekonomi daerah Jawa Timur yang cukup baik dibuktikan dengan diperolehnya prestasi pada tahun 2022. Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan APBD *Award* Tahun 2023 dengan kategori realisasi pendapatan APBD tertinggi dan berada pada peringkat lima. Selain itu Provinsi Jawa Timur memiliki potensi daerah yang melimpah mulai dari kondisi geografis, objek wisata, dan jumlah sumber daya manusianya.¹⁰ Pemaparan tersebut merupakan alasan peneliti memilih lokasi penelitian yaitu di Provinsi Jawa Timur.

Sumber PAD yang paling potensial adalah pajak daerah dan retribusi daerah, sebab kedua komponen tersebut merupakan sumber pendapatan yang sepenuhnya dapat direncanakan dan direalisasikan oleh pemerintah daerah. Penerimaan daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lain tergantung pada potensi yang dimiliki

¹⁰ Direktorat Jenderal Bina Keuda Kementerian Dalam Negeri, "Mendagri Beri Penghargaan APBD Award 2023 Kepada Kepala Daerah dengan Realisasi APBD Tertinggi" (Jakarta, 2023), <https://keuda.kemendagri.go.id/berita/detail/4357>.

oleh masing-masing daerah. Selain itu pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bentuk peran serta dari masyarakat secara nyata dalam penyelenggaraan otonomi daerah.¹¹ Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Timur dapat dikatakan cukup tinggi dengan kontribusi terbesar berasal dari penerimaan pajak daerah. Adapun data realisasi penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022 sebagai berikut.

Tabel 1.2

**Realisasi Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022
(dalam Milyaran Rupiah)¹²**

Tahun	Pajak Daerah		
	Anggaran	Realisasi	%
2018	21.046,69	24.425,32	116.05
2019	23.109,84	25.484,48	110.28
2020	26.008,48	23.263,32	89.45
2021	23.788,91	25.257,95	106.18
2022	25.632,49	29.003,96	113.15

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pajak daerah Provinsi Jawa Timur dalam realisasinya sudah hampir semua memenuhi target yang telah ditentukan. Tahun 2018 realisasi yang dicapai sebesar 116.05% atau sebesar Rp. 24.425,32 miliar dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 21.046,69 miliar. Pada tahun 2019 angka realisasi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun masih tetap memenuhi target yang ditetapkan. Namun,

¹¹ Meilda Ellysa Putri dan Sri Rahayu, "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah," *Jurnal E-Proceeding of Management* 2, no. 1 (2015): 281–88, <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/1481>.

¹² Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (djpk.kemenkeu.go.id), diakses pada 23 Desember 2023

pajak daerah di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan realisasi sebesar Rp. 23.263,32 miliar dari anggaran yang dipatok Rp. 26.008,48 miliar. Realisasi yang tercapai sebesar 89.45%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan realisasi sebesar 20.83 persen dari tahun 2019.

Penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah merupakan pendapatan yang potensial, dilihat dari data realisasi pajak daerah dengan tercapainya target realisasi setiap tahun. Pemerintah perlu untuk mempertahankan kinerja pajak daerah guna mendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Selain dari penerimaan pajak, terdapat juga pos retribusi daerah yang turut berkontribusi dalam keuangan pemerintah daerah. Retribusi daerah juga termasuk ke dalam sumber PAD yang potensial karena setiap orang atau badan yang membutuhkan perizinan tertentu atau mendapatkan layanan jasa dari pemerintah daerah diharuskan untuk membayar pungutan atas pelayanan tersebut.

Penerimaan retribusi daerah Provinsi Jawa Timur masih tergolong rendah dan belum maksimal. Maka dari itu pemerintah perlu mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah melalui objek-objek yang potensial dan dapat direncanakan penerimaannya. Berikut merupakan data realisasi retribusi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1.3
Realisasi Retribusi Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022
(dalam Milyaran Rupiah)¹³

Tahun	Retribusi Daerah		
	Anggaran	Realisasi	%
2018	1.473,85	1.435,95	97.43
2019	1.461,36	1.586,78	108.58
2020	1.637,33	1.217,77	74.38
2021	1.538,07	1.182,62	76.89
2022	1.690,70	1.290,08	76.30

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa realisasi retribusi daerah Provinsi Jawa Timur masih rendah. Pada tahun 2018 dalam realisasinya belum memenuhi target yang ditetapkan. Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 1.473,85 miliar dengan realisasi sebesar Rp. 1.435,95 atau 97.43%. Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 11,15% dengan realisasi 108,58%. Namun di tahun-tahun setelahnya mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai angka realisasi hanya 74.38% di tahun 2020. Pemerintah perlu memperhatikan potensi-potensi daerah yang dapat menjadi pendorong tingkat retribusi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan kontribusi yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Daerah Tingkat II. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator bagi para pelaku ekonomi seperti masyarakat, Statistic8, dan lembaga keuangan dalam menentukan kebijakan bagi

¹³ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (djpk.kemenkeu.go.id), diakses pada 23 Desember 2023

kepentingan daerah. Tugas dan peranan BUMD adalah mendorong kegiatan ekonomi daerah, menciptakan kesempatan kerja, serta menyediakan jasa pelayanan sosial.¹⁴ Ketika kinerja BUMD berjalan sesuai dengan yang direncanakan tentunya akan mendapatkan keuntungan/laba. Laba dari BUMD inilah yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan anggaran belanja daerah.

Berdasarkan penjelasan mengenai pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan pendapatan asli daerah (PAD) terdapat sebuah permasalahan. Tahun 2019 realisasi retribusi daerah ialah sebesar Rp. 1.586,78 milyar meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp. 1.435,95 milyar, seharusnya dengan meningkatnya retribusi daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Akan tetapi yang terjadi adalah realisasi pendapatan asli daerah mengalami penurunan yaitu sebesar 3,92% dari tahun sebelumnya. Pada tahun yang sama pajak daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 5,77%, sedangkan laba BUMD meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 983.83 milyar, namun peningkatan pada laba BUMD menurunkan realisasi pendapatan asli daerah.

Penjelasan mengenai variabel-variabel dalam penelitian menunjukkan adanya permasalahan yang terjadi yaitu pada saat retribusi daerah dan laba BUMD meningkat justru menurunkan tingkat realisasi pendapatan asli daerah. Kondisi ini bertentangan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan jika pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh pajak daerah,

¹⁴ Putri Utamia dan Emi Masyitah, "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh," *Jurnal MAIBIE* 1, no. 1 (2023): 82–94, <https://kti.potensi-utama.ac.id/index.php/MAIBIE/article/view/846>.

retribusi daerah, dan laba BUMD. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Dwi menunjukkan hasil bahwa pendapatan asli daerah dipengaruhi secara positif oleh variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan laba BUMD.¹⁵

Berdasarkan uraian latar belakang yang peneliti telah jabarkan, serta mengingat pentingnya pendapatan asli daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Timur”**. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan laba BUMD sehingga dapat meningkatkan pembangunan daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

¹⁵ Rizky Dwi Nur Annisa, “Aalisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur,” *Jurnal Simki Economic* 01, no. 08 (2017), <http://simki.unpkediri.ac.id/detail/13.1.02.01.0112>.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada pendahuluan, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Penerimaan pendapatan asli daerah diduga dipengaruhi oleh beberapa variabel yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan laba BUMD.
2. Pajak daerah memiliki peranan penting dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Namun dalam realisasinya penerimaan pajak daerah masih mengalami fluktuasi setiap tahunnya, upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah dengan memperluas penerimaan pajak daerah dengan cara menegakkan masyarakat dalam membayar pajak dan juga memperluas objek pajak.
3. Retribusi daerah merupakan salah satu pos penerimaan yang ikut berkontribusi dalam pendapatan asli daerah. Namun dalam pelaksanaannya penerimaan retribusi daerah masih sangat rendah jika dibandingkan dengan pos penerimaan lainnya seperti pajak daerah.
4. Laba BUMD memberikan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah, namun penerimaan pos ini juga masih rendah. Perlu adanya peningkatan laba BUMD untuk menunjang pendapatan asli daerah sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian suatu daerah dan berdampak terhadap masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di bahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pajak daerah, retribusi daerah, dan laba BUMD secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah penerimaan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur?
4. Apakah laba BUMD berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan laba BUMD secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk menganalisis pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk menganalisis pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur.
4. Untuk menganalisis pengaruh laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau wawasan untuk pengembangan ilmu pengetahuan terutama pada mata kuliah dibidang ekonomi perpajakan, ekonomi mikro dan makro serta referensi analisis keuangan negara.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pemerintah dan pemegang kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan laba BUMD.
 - b. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini mampu meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dalam pemanfaatannya dapat mensejahterakan masyarakat.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian maka perlu adanya sebuah ruang lingkup. Dalam penelitian ini berfokus untuk menganalisis terkait variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah (Y)

yang dipengaruhi oleh tiga variabel bebas yaitu Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), dan Laba BUMD (X3).

2. Keterbatasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas lingkup objek penelitian hanya mencakup wilayah provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur.
2. Penelitian ini hanya menggunakan data terbaru lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2018-2022 yang diperoleh dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau wawasan untuk pengembangan ilmu pengetahuan terutama pada mata kuliah dibidang ekonomi perpajakan, ekonomi mikro dan makro sertareferensi analisis keuangan negara.
 - b. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah dan pemegang kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan laba BUMD.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini mampu meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dalam pemanfaatannya dapat mensejahterakan masyarakat.

H. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik suatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan dapat dikemukakan definisi konseptual dari masing-masing variabel sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Darise, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

b. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama

¹⁶ Nurlan Darise, *Pengelolaan Keuangan Daerah* (Jakarta: PT.Indeks, 2007), hlm 43.

kendaraan bermotor, pajak pemanfaatan air bawah tanah, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak bahan bakar kendaraan bermotor.¹⁷

c. Retribusi Daerah

Menurut Juli Panglima Saragih, Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.¹⁸

d. Laba BUMD

Laba BUMD adalah keuntungan yang diberikan oleh BUMD baik dalam bentuk sumbangan atau dana untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang berguna untuk membantu mendorong pembangunan daerah.¹⁹

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan maksud dari istilah yang menjelaskan secara operasional mengenai penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan judul penelitian yaitu “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba Badan Usaha Milik Daerah

¹⁷ Eka Meiliya Dona et al., “Pengaruh Pajak Daerah, Laba BUMD terhadap PAD Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan,” *Jurnal Bisnis Darmajaya* 8, no. 2 (2022): 128–39, <https://doi.org/10.30873/jbd.v8i2.3302>.

¹⁸ Agustinus Nusa, Syaikhul Falah, and Ivanna K. Wamafma, “Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Yahukimo,” *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)* 2, no. 3 (2017): 1–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.52062/keuda.v2i3.727>.

¹⁹ Astrie Merisa Ramadanti, Rahma Nazila Muhammad, and Aisyah Vanadia Rubianto, “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung,” *Indonesian Accounting Research Journal* 2, no. 2 (2022): 94–105, <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i2.3250>.

(BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur”, maka secara operasional peneliti memiliki maksud untuk menganalisis mengenai pendapatan asli daerah yang dipengaruhi oleh variabel penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan laba BUMD di Provinsi Jawa Timur.

I. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan penelitian ini mencakup enam bab, memiliki sub bab yang memberitahukan penjelasan secara jelas bagaimana permasalahan yang akan dibahas, supaya mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah berisi mengenai penjelasan terhadap judul yang telah dibuat. Kemudian rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan teori, berisi landasan teori yang digunakan dalam melakukan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berfikir penelitian dan hipotesis.

BAB III: Metode penelitian, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel, sumber data , teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: Hasil penelitian, terdiri dari hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis).

BAB V: Pembahasan hasil penelitian

BAB VI: Penutup, terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan serta saran-saran yang ditujukan peneliti kepada berbagai pihak yang berkepentingan terhadap obyek penelitian tersebut.